

EKSISTENSI PERAN BEA DAN CUKAI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DI INDONESIA

Reynaldi¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : reynaldiaprilianto515@gmail.com

ABSTRACT

International trade through imports and exports is increasingly developing rapidly in line with the increase in world products and countries in the world that provide free access to the import of goods in other countries. From the description above, the main problems in this thesis are: 1. How is the development of smuggling crimes in Indonesia. 2. How is the existence of the role of Customs and Excise in dealing with criminal acts of smuggling in Indonesia in normative juridical studies. The research method used in this discussion, the author uses a descriptive type of research and a normative juridical approach, with primary, secondary, tertiary legal materials, and the collection of legal materials with library studies. In general, the authority of Customs and Excise according to Law No. 17 of 2006 is, Customs and Excise receives reports or information from someone about the existence of a criminal act, summons people to be heard and examined as suspects or witnesses, examines, searches for, and collects information by committing crimes. criminal acts, arresting and detaining persons suspected of committing a crime, requesting information and evidence from suspects who have committed a crime. Smuggling is one type of crime related to the illegal delivery of goods or people (contrary to the law, either by importing it to Indonesia or sending it to other countries, smuggling is done to take advantage).

Keywords : Existence, Customs and Excise, Smuggling in Indonesia

ABSTRAK

Perdagangan Internasional melalui impor dan ekspor semakin lama menjadi semakin pesat perkembangannya seiring dengan bertambahnya produk dunia dan negarapun di dunia ini yang memberikan akses yang sebebas-bebasnya untuk pemasukan barang di negara lain. Dari uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perkembangan tindak pidana penyelundupan di Indonesia, bagaimakah eksistensi peran Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan di Indonesia dalam kajian yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini, penulis menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif dan pendekatan yuridis normatif, dengan bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Secara umum kewenangan Bea dan Cukai menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2006 adalah, Bea dan Cukai menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana, meminta keterangan dan bukti dari tersangka yang melakukan tindak pidana. Penyelundupan menjadi salah satu jenis tindak pidana yang berhubungan dengan pengiriman barang-barang atau manusia yang dilakukan secara ilegal (bertentangan dengan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

hukum, baik dengan cara memasukkan ke Indonesia maupun mengirimkan ke negaranegara lain, penyelundupan dilakukan untuk mengambil keuntungan).

Kata Kunci: Eksistensi, Bea dan Cukai, Penyelundupan di Indonesia

PENDAHULUAN

Kejahatan akan selalu ada, seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun, demikian tutur Barneers dan Teeters. Kejahatan tidak dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru ia selalu ada dan dilakukan masyarakat.. Kejahatan telah menjadi bagian yang nyata dalam kehidupan manusia yang corak, ragam, bobot dan modus operandinya seiring dengan perkembangan yang terjadi dan bahkan kadang-kadang dikehendaki oleh masyarakat. Kejahatan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri oleh masyarakat, karena kejahatan memang terjadi dan menjadi peristiwa di masyarakat.

Manusia di dalam pergaulan hidup masyarakat, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu. Misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan di dalam wujud yang serasi dan seimbang. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi, oleh karena itu nilai-nilai tersebut lazimnya bersifat abstrak.

Penjabaran secara lebih konkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan anjuran, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan manusia.

Perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa kejahatan atau tindak pidana merupakan gambaran nyata dari dinamika sosial dan bahkan sebagai sisi buram dari kehidupan bermasyarakat, dan keberhasilan program pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan

secara tuntas karena berbagai macam faktor sumber daya yang kurang mendukung menyebabkan timbulnya modus-modus kejahatan yang baru di tengah-tengah kehidupan masyarakat karena tuntutan perolehan status sosial dalam lingkungannya atau kebutuhankebutuhan yang perlu dipenuhinya.

Masalah kriminalitas bukanlah masalah yang sederhana terutama bagi masyarakat yang mengalami perkembangan sosial ekonomi seperti di Indonesia saat ini. Didalam proses pelaksanaan pembangunan nasional banyak sekali faktor penunjang yang diperlukan untuk keberhasilan pembangunan. Faktor penunjang itu antara lain: faktor modal, tempat/lahan, waktu, tenaga, peran serta masyarakat dan selain faktor penunjang tersebut diatas ada faktor yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan yaitu faktor keamanan, dari aspek keamanan ini, hak-hak anggota masyarakat tetap bisa terjaga. Jika keamanannya terganggu, maka ada hak-hak masyarakat yang menjadi korban. Faktor keamanan sangatlah penting artinya, sebab dari keseluruhan faktor penunjang yang ada tidak akan mungkin berhasil dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan tanpa didukung situasi keamanan yang kondusif. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dibutuhkan situasi keamanan yang kondusif, karena hakekat pembangunan nasional itu sendiri bertujuan untuk semakin meningkatkan suasana aman, tertib dan tentram dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa. Keamanan kondusif merupakan cerminan dari stabilitasnya atau amannya kehidupan masyarakat, khususnya dari gangguan kriminalitas.

Kenyataan yang kita ketahui dewasa ini adalah angka kriminalitas menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun baik peningkatan kuantitas maupun kualitas kejahatan tersebut. Peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan ini meliputi modus operandi, peralatan yang dipergunakan, serta sasaran tindak kejahatan. Pelaku kejahatan cenderung semakin berani dan terang-terangan didalam melakukan aksinya sehingga sangat meresahkan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya kejahatan maka peran aparat penegak hukum yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan yang setiap saat bisa timbul di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Terbukti, akhir-akhir ini tindak kejahatan semain bermacam-macam dan punya kecenderungan meningkat secara kuantitatif dan kualitatif. Pelakunya (kejahatan) juga dari berbagai status. Ada yang menjadi pelaku kejahatan yang tingkat pendidikannya rendah, dan ada pula pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan berpendidikan tinggi. masing-masing pelaku ini mempunyai peran dalam melakukan kejahatan.

Ada seseorang yang tidan diduga menjadi pelaku kejahatan, ternyata ia sebagai pelaku utamanya. Dugaan yang keliru ini berkaitan dengan masalah profesi, jabatan, kedudukan, atau tingginya tingkat pendidikan. Semula seseorang seperti ini dianggap tida akan mungkin melaukan kejahatan, tetapi ternyata di kemudian hari, tiba-tiba diketahui orang ini terlibat dalam kejahatan. Hal seperti sering terjadi dalam masyarakat, mungkin mereka melakukan suatu kejahatan karena didorong oleh situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Masyarakat yang tidak menduganya dibuat kaget dengan kenyataan kriminalitas itu, mengingat seseorang itu mempunyai jabatan atau pekerjaan yang tergolong baik dan mapan. Masyarakat merasa ditipu oleh seseorang yang menggunakan profesinya untuk melakukan tinda kejahatan. Kejahatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang itu menyesuaikan dengan kepentingan yang hendak diwujudkan. Seseorang ini berkeinginan mendapatkan uang atau penghasilan banyak dengan cara – cara yang melanggar norma yuridis, atau berani menjadi penjahat. Kejahatan timbul serigkali karena pengaruh lingkungan sekitar, kejahatan juga bisa terjadi karena pengaruh dari berita di media massa dan lain sebagainya.

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. JE Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya da semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat da cara pelaksanaannya

Hal itu menunjukkan bahwa dunia kejahatan bukanlah dunia yang asing bagi kehidupan manusia dan masyarakat, tetapi sebagai dunia yang dekat hubungannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin berkembang suatu masyarakat, ada kecenderungan semakin berkembang pula kejahatan. Perkembangan kejahatan dalam suatu masyarakat, adalah cermin dari kenyataan kehidupan masyarakat. Kejahatan selalu ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri.

Kejahatan merupakan kenyataan yang terjadi di setiap masyarakat dan bangsa, sehingga ada adegium yang menyatakan bahwa “Dimana ada masyarakat disitu ada

kejahatan”. Kejahatan adalah sisi lain dari wajah atau potret masyarakat. Membahas kejahatan berarti membahas sisi lain yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Ketika di masyarakat sedang banyak masalah kejahatan yang membuat anak-anak sebagai korbannya, maka kondisi masyarakat ini berha ditanyakan.

Salah satu problem yang mengakibatkan kehidupan masyarakat tidak tenang, tidak harmonis, tidak nyaman, dan terjadi banyak kerugian baik harta maupun nyawa adalah problem kejahatan. Kriminaitas telah hadir menjadi bagian dari kehidupan riil masyarakat, dimana ada masyarakat atau mausia di situ ada kejahatan. Kejahatan tidak akan mungkin ada tanpa adanya masyarakat. Di tengah masyarakat itulah kejahatan menunjukkan bentuk nyata dan ragamnya sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Masyarakat memang tidak menginginkan kehidupannya serba tidak nyaman dan tidak harmonis, akan tetapi masyarakat juga sering kali tidak mampu mencegah atau menanggulangi kriminalitas yang berdampak buruk terhadap dirinya, karena lahirnya atau terjadinya dan maraknya kejahatan adalah terkait dengan pola hidup dalam berbudaya, berekonomi, dan berinteraksi sosial yang menodorong terjadinya tindak kejahatan. Seperti halnya hukum, kalau hukum dibuat karena tuntutan masyarakat yang menginginkan eksistensi hukum sebagai rujukan, pegangan, dan pijakan berprilaku anggota masyarakat, khususnya dalam mengatur tertib sosial, mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk perbuatan menyimpang, maka kejahatan merupakan salah satu gambaran yang menunjukkan bahwa ada perilaku anggota masyarakat ini tidak selalu dapat dituntut untuk mematuhi hukum dan memilih kejahatan sebagai bagian dari hidupnya. Eksistensi hukum menjadi rambu-rambu yang menggariskan tentang aturan main (*rule of game*) bagi setiap warga negara tanpa kecuali agar perilaku dan kontruksi sosial, politik, keagamaan, budaya, dan aspek-aspek kehidupan lainnya berjalan di jalur yang benar. Rambu-rambu ini menjadi dasar pijakan bagi masyarakat supaya tidak tergelincir dalam perbuatan yang merugikan diri, masyarakat, dan bangsanya. Salah satu jenis kejahatan yang mengakibatkan kerugian tidak sedikit adalah tindak pidana penyelundupan. Salah satu jenis tindak pidana (kejahatan) yang tergolong serius adalah tindak pidana penyelundupan. Penyelundupan menjadi salah satu jenis tindak pidana yang berhubungan dengan pengiriman barang-barang atau manusia yang dilakukan secara illegal (bertentangan dengan hukum, baik dengan cara memasukkan ke Inodnesia maupun mengirimkan ke negara-negara lain, penyelundupan dilakukan untuk mengambil keuntungan, yang keuntungan ini secara umum berhubungan dengan masalah materi (keuntungan uang dan lainnya).

Tindak pidana penyelundupan ini sudah berusaha diberantas atau ditanggulangi oleh aparat penegak hukum atau pihak-pihak yang mendapatkan kepercayaan untuk mencegah atau menanggulangnya, seperti aparat (petugas) bea cukai, akan tetapi dalam kenyataannya, penyelundupan masih terus saja terjadi dan bermacam-macam obyeknya, yang bukan hanya menyangkut barang, tetapi juga manusia.

Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan Negara untuk saat ini, meskipun negara punya sumber-sumber pendapatan lain di luar pajak. Pajak memberikan porsi yang sangat besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu hampir mencapai 80 persen. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai. Namun, untuk mengurangi beban pajak atau bahkan menyingkirkannya, tak jarang dilakukan tindakan-tindakan illegal. Hal yang seringkali dilakukan antara lain penyelundupan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar melanggar hukum yaitu prosedur ekspor-impor yang berlaku dengan melakukan penyelundupan guna menghindari pajak atau cukai. Hal inilah yang sangat merugikan negara hingga nilai triliunan rupiah. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan memiliki suatu peraturan perundang-undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Penyelundupan barang belakangan menyita perhatian publik setelah kasus Harley Davidson yang diselundupkan dalam maskapai penerbangan. Namun, kejadian itu hanya sebagian kecil dari geliat penyelundupan yang terjadi di sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa modus yang digunakan dalam kasus penyelundupan biasanya adalah dengan memberitahukan barang tidak sesuai dengan isi sebenarnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sejak awal Januari sampai dengan 12 Desember 2019 terdapat 17.716 penindakan atas kasus penyelundupan. Nilai dari penyimpangan perpajakan atawa Barang Hasil Penindakan (BHP) tersebut setidaknya bernilai Rp 4,772 triliun. Lebih rinci, secara umum ada empat klasifikasi penyelundupan. Pertama penyelundupan atas impor dengan perkiraan BHP sebesar Rp 3,804 triliun dengan total 11,444 penindakan. Kedua, dari fasilitas kepabeanan dengan BHP senilai Rp 551 miliar atau 5,803 penindakan. Ketiga, dari aspek cukai mencapai 247 kasus atau setara dengan nilai BHP yakni Rp 273 miliar.

Keempat, dari kasus ekspor sebanyak 247 penindakan dengan perkiraan kerugian mencapai Rp 145 miliar. Berdasarkan fenomena itulah, maka penulis tertarik untuk membahas tentang Eksistensi Peran Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Dalam Kajian Yuridis Normatif dengan rumusan masalah bagaimana perkembangan tindak pidana penyelundupan di Indonesia dan bagaimana eksistensi peran Bea dan Cukai dalam penanggulanga tinda pidana penyelundupan di Indonesia dalam kaian yuridis normatif. Penulis menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang mausia, keadaan atau gejala- gejala lainnya. Objek penelitian atau data yang akan dicari dan dibahas serta dideskripsikan adalah tentang perkembangan tindak pidana peneylundupan di Indonesia, dan eksistensi peran Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan di Indonesia dalam kaian yuridis normatif.

Sedangkan berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian deskriptif tersebut, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum ini dapat juga dinamakan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini sebatas mengkai dari literature tentang perkembanga tindak pidanapenyelundupan di Indonesia, dan eksistensi pera Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan di Indonesia dalam kajian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

Perkembangan Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Salah satu jenis tindak pidana (kejahatan) yang tergolong serius adalah tindak pidana penyelundupan. Penyelundupan menjadi salah satu jenis tindak pidana yang berhubungan dengan pengiriman barang-barang atau manusia yang dilakukan secara ilegal (bertentanga dengan hukum, baik dengan cara memasukkan ke Indonesia maupun mengirimkan ke negara-negara lain. Penyelundupan dilakukan untuk mengambil keuntungan, yag keuntungan dengan cara menghindari beban pajak yang seharusnya ditanggung oleh mereka yang melakukan ekspor dan impor barang dari wilayah Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan ini sudah berusaha diberantas atau ditanggulangi oleh aparat penegak hukum atau pihak-pihak yang mendapatkan kepercayaan untuk mencegah atau menanggulanginya, seperti aparat (petugas) bea cukai akan tetapi dalam kenyataannya, penyelundupan masih terus saja terjadi dan bermacam-macam obyeknya, yang bukan hanya menyangkut barang, tetapi juga manusia. Hal ini sangat memprihatinkan karena dari waktu ke waktu penyelundupan terus meningkat baik dari kuantitas maupun aspek kualitas. Kasus-kasus banyak diberitakan oleh media, baik di Koran, berita online, maupun dari media televisi.

Masalah penyelundupan punya substansi sangat dalam dan ruwet. Aspek formal dari kegiatan-kegiatan procedural, utamanya yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan penyelundupan relative tidak sulit. Permasalahan selalu timbul begitu kita mulai “menyimpang” dari proses standar. Penyebab penyimpangan bisa banyak, bervariasi dan punya tingkat kedalaman beda-beda. Satu sama lain tergantung modus “intervensi” yang ada. Bea Cukai sendiri punya banyak masalah internal, antara lain aspek infrastruktur, anggaran, system dan prosedur, under invoice, salah klasifikasi, salah pemberitahuan, audit, “intelijen” sampai kualitas SDM termasuk kepemimpinan (leadership) dari tiap strata yang sudah pekat dengan suasana yang tidak kondusif. Masalah-masalah tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait bahkan disebabkan sumber-sumber masalah di luar institusi Bea Cukai. Keruwetan dan tumpang tindih kewenangan, seperti Kewenangan Menteri Keuangan yang tersebar di berbagai institusi, sampai pada “komplikasi-komplikasi” yang ada pada pelabuhan sebagai akibat banyaknya kepentingan pihak-poha, institusi-institusi yang bercokol di pelabuhan-pelabuhan merupakan setumpuk masalah, yang walau ada di luar Bea dan Cukai, tapi punya dampak kepada permasalahan internal Bea dan Cukai. Pada sudut yang lain, ada kelompok-kelompok yang punya “kepentingan-kepentingan” (kelompok vested interest). Mereka diluar “sistem” secara institusional, tapi berpotensi menimbulkan atau memperburuk masalah.

Ketiga kelompok masalah tersebut saling berinteraksi, saling mempengaruhi, saling tekan, sehingga menjadi sangat ruwet. Setiap upaya perbaikan dengan beka idealisme, semangat, motivasi, harus benturan dengan “tembok” besar tersebut. Boleh jadi mereka tidak suka dengan Bea dan Cukai atau pelabuhan yang tertib, maka mengambil keuntungan (take advantage) dari keruwetan-keruwetan tersebut. Apalagi mereka punya berbagai kepentingan-kepentingan praktis material hingga politis. Masalah yang sangat dalam tersebut, dan boleh jadi ada pada berbagai strata itu, terutama bersumber dari masalah *belief*

yang sudah harus berani mulai disorot, diakui dan diperbaiki. Visi, misi, strategi harus menjadi komitmen praktis dan filosofis agar kita tidak kesasar. Tanpa hal-hal itu tidak heran jika sikap-sikap aparat yang tampak di permukaan adalah: tidak adanya commercial judgement positif, aparat tidak kompeten, tidak konsisten, tertutup, penuh intimidasi dan dalam banyak hal timbulkan kebingungan-kebingungan.

Secara teknis, proses importasi relative ruwet dan melibatkan banyak kepentingan pihak, baik itu kegiatan-kegiatan sebelum barang tiba, proses pada saat barang tiba, proses customs clearance hingga pada proses pengeluaran barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia) dimulai pada saat importir dan eksportir bernegosiasi dalam sales contract yang mereka buat. Karena itu secara operasional, kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia, juga harus jelas dan tegas, seperti meneliti tanggal L/C dibuka, tanggal pada saat barang di store, diatas kapal (tanggal B/L), tanggal pembongkaran atau tanggal diajukannya dokumen pabean ke Bea dan Cukai. Semua itu termasuk bagian dari kegiatan memasukkan barang ke Indonesia. Semua keruwetan peraturan, sistem, prosedur, bertumpuk dan tumpang tindihnya institusi, hanyalah merupakan aspek-aspek yang dapat menjadi “kambing hitam” dari “belief” yang tidak sama dari pimpinan-pimpinan, pejabat-pejabat, pegawai-pegawai yang punya “relevansi” dengan upaya mencegah dan memberantas penyelundupan. Menyamakan belief juga tidak mudah, tapi itu menjadi prasyarat memerangi penyelundupan. Kalau itu sudah menjadi komitmen bersama, tulus untuk tugas-tugas public ini, tanpa pamrih untuk bangsa dan negara, dan sekaligus dalam upaya mencari Ridha Allah, baru aspek-aspek formal lainnya akan berbicara secara positif. Tanpa itu kita akan tetap terbelenggu kepada euphoria, pertengkaran, diskusi formal yang boleh jadi “dikemas dalam bentuk yang seolah-olah benar, untuk kepentingan public, padahal itu tidak lebih dari kepentingan lainnya yang lebih sempit.

Beberapa kasus besar penyelundupan yang merugikan Negara dengan nilai sangat tinggi adalah sebagai berikut: Posisi Kasus 1:21 Mei 2021 Penyelundupan Benur Senilai Rp 20 Miliar di Jambi Digagalkan Kasus ini terjadi di Propensi Jambi. Polisi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster atau benur senilai Rp 20 miliar melalui jalur laut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Sebanyak 36 boks berisi 135 ribu ekor benur jenis pasir diamankan dari sebuah perahu kayu. "Tim Petir Polres Tanjung Jabung Barat awalnya memperoleh informasi tentang adanya kegiatan penyelundupan benih lobster. Dari informasi itu, kita lakukan pengejaran dan penyisiran. Akhirnya kita melihat satu unit pompong menuju ke arah laut, dan kita kejar, kita hentikan, dan ditemukan boks styrofoam

warna putih sebanyak 36 boks yang berisi benih lobster senilai Rp 20 miliar 250 juta, Penggagalan upaya penyelundupan benur ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjung Jabung Barat. Selain mengamankan ratusan ribu benur, polisi mengamankan empat pria. Rencananya, benur yang berada di perahu itu akan dibawa dan diserahkan ke speedboat yang telah menunggu di tengah laut. Dari situ, benur akan diselundupkan menuju luar negeri, namun upaya itu gagal setelah polisi mengetahuinya. "Setelah berhasil mengamankan perahu itu, kita juga lakukan pengejaran terhadap speedboat yang menunggu benur itu, diduga dikendarai oleh Sijef dan Ale. Namun, ketika dilakukan pengejaran, tidak dapat diamankan karena sarana- prasarana terbatas. Tetapi sudah kita identifikasi dan barang bukti serta empat orang sudah diamankan," Kata Guntur Saputro. Posisi Kasus 2 16 April 2021 Bareskrim-KKP Gagalkan Penyelundupan 100 Ribu Benih Lobster Tujuan Singapura Satgas Gakkum BBL Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri bersama Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagalkan upaya penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) di Banten. Benih lobster itu akan dibawa ke Singapura. Pengungkapan kasus itu terjadi di Kampung Ciero Gede, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Banten. Direktur Tipidter Bareskrim, Brigjen Pipit Rismanto, selaku Kasubsatgas Gakkum mengatakan, pengungkapan itu berawal adanya informasi transaksi ilegal baby lobster. "Informasi itu kemudian ditindaklanjuti tim lidik 1 Satgas BL yang dipimpin AKBP Wiwin Setiawan. Berdasarkan pendalaman atas informasi itu, diketahui penyelundupan ke Singapura akan menggunakan jalur darat melalui daerah Sumatera. Tim kemudian melaksanakan observasi dan pengamatan di lokasi yang dicurigai," kata Pipin, dalam keterangan tertulisnya. "Setelah melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan, tim mencurigai 2 unit kendaraan roda empat. Kendaraan itu kemudian dibuntuti. Setelah itu, tim kemudian melakukan penyergapan terhadap 2 unit kendaraan roda empat itu," lanjutnya. Dari 2 mobil yang diamankan, ada 20 dus yang berisi benih lobster. Jika ditotal ada 100 ribu benih lobster secara keseluruhan. "2 unit kendaraan roda empat sedang membawa sekira 20 dus sterofoam kurang lebih berisi 100 ribu ekor Benih Bening Lobster," kata Pipin. Pipin mengamankan satu orang sopir berinisial S. Sedangkan sopir lain, melarikan diri saat penangkapan dan saat ini masih dalam pencarian. "Saat dilakukan penyergapan, 1 orang sopir dan 1 orang pengawalnya melarikan diri. Namun, petugas berhasil mengamankan seorang sopir berinisial S, warga Kelurahan Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sedangkan 2 orang yang berhasil

melarikan diri masih dalam pengejaran," Posisi Kasus 3: Desember 2019.

Kasus Penyelundupan Brompton-Harley Hingga Eks Dirut Garuda Jadi Tersangka “Penyelundupan motor Harley-Davidson dan sepeda Brompton ke pesawat baru Garuda Indonesia menghebohkan publik di akhir tahun 2019 lalu. Teranyar, mantan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Ari Askhara menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Pesawat baru Garuda tipe Airbus A330-900 Neo disusupi sejumlah barang mewah yang tak dilaporkan, di antaranya motor Harley-Davidson dan sepeda Brompton. Kabar itu membuat geger lantaran pelaku penyelundupan adalah para direksi Garuda Indonesia yang melibatkan berbagai oknum. Menteri BUMN Erick Thohir mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sejumlah direksi yang terlibat. Erick secara resmi memberhentikan sementara seluruh direktur yang terlibat dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Airbus A330-900 Neo pada Sabtu, 7 Desember 2019 lalu. Diketahui ada empat direktur Garuda Indonesia yang ada di pesawat berisikan Harley Davidson. Mereka tidak mengantongi izin dinas dari kementerian. Berdasarkan manifest, keempat direktur tersebut adalah, I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara (Direktur Utama Garuda), Iwan Joeniarto (Direktur Teknik dan Layanan Garuda), Mohammad Iqbal (Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha), dan Heri Akhyar (Direktur Capital Human). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjatuhkan denda Rp 100 juta kepada PT Garuda Indonesia Tbk. Denda diberikan terkait penyelundupan Harley-Davidson dan sepeda Brompton yang diangkut menggunakan pesawat baru Garuda Indonesia dari Perancis pada November 2019 lalu. Direktur Jenderal Perhubungan Udara saat itu, Polana B Pramesti, menjelaskan besaran denda Rp 100 juta kepada Garuda sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Ketidaksesuaian Flight Approval atau Data Penerbangan. Skandal penyelundupan kendaraan mewah itu diselidiki Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Semua pihak yang terlibat skandal penyelundupan, tak terkecuali Ari Askhara, terancam pidana penjara.”

Kasus-kasus penyelundupan yang merugikan Negara dengan nilai milyaran bahkan trilyunan rupiah sangat banyak terjadi di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani “mengatakan, penyelundupan barang ilegal, termasuk narkoba meningkat menjelang akhir tahun. Catatan Bea Cukai, terdapat 440 kasus penyelundupan narkoba sepanjang Januari hingga 6 Desember 2019. "Hari-hari ini teman-teman Bea Cukai di hampir semua pelabuhan juga menangkap narkoba yang makin meningkat menjelang

akhir tahun ini," Ia menjelaskan, modus yang digunakan oleh penyelundup narkoba semakin bervariasi. Salah satunya, yakni dengan memanfaatkan ibu-ibu dan anak-anak. "Ini sangat luar biasa modusnya untuk menyelundupkan barang yang sangat berbahaya ini," Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 440 temuan penyelundupan narkoba sejak awal tahun hingga 6 Desember 2019 meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2018, terdapat sebanyak 430 kasus, lalu 2017 sebanyak 346 kasus, dan 2015 sebanyak 176 kasus. Temuan Bea Cukai, narkoba diselundupkan melalui berbagai cara. Terdapat 186 kasus penyelundupan melalui pos, 17 kasus melalui transportasi darat, 66 kasus melalui transportasi laut, 171 kasus melalui transportasi udara. Lalu 134 kasus dibawa tangan, 18 kasus melalui bantuan awak pesawat, 23 kasus dengan menyembunyikan di bagasi penumpang, 11 kasus melalui kontainer, dan 68 kasus melalui kantong. (Baca: Foto: Tangkapan Besar Mobil Mewah Selundupan) Adapun jenis narkotika dan dan psikotropika yang banyak diselundupkan yakni tipe 5-FluoroADB, 5F-MDMB-PICA, ADB-Chminaca, Alprazolam, Amphetamine, Bromazepam, Buprezolina, Ketamine, Kodeins, Kokain, Lorazepam, LSD, Methadone, Methysilfenidaat, Midzolam, NPS Synthetic Cannabinoid, Oksazepam, dan Oksikodona. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional atau BNN, jumlah pengguna narkoba pada 2019 meningkat 0,03% menjadi 3,6 juta orang. Adapun umur pengguna narkoba rata-rata berada direntang 15 hingga 65 tahun. Ganja masih menjadi favorit dengan 63% pengguna menggunakan narkotika jenis tersebut.

Eksistensi Peran Bea dan Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia.

Bea dan Cukai adalah suatu Lembaga pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengurus punguta Bea dan Cukai yang dikenakan terhadap barangbarang yang keluar ataupun masuk daerah pabean agar pelaksanaan, pengawasan, pelarangan, dan pembatasan menjadi efektif dan terkoordinasi. Tugas dan wewenang Kantor Bea dan Cukai dalam pengawasan Ekspor dan Impor Barang di Pelabuhan adalah sebagai berikut: Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan dan untuk dilakukan: wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Pengawasan adalah penilikan penjagaan atas ekspor dan impor dan Kantor Bea dan Cukai adalah satu instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan operasional dalam hal pemungutan Bea masuk maupun Cukai terhadap barang ekspor atau impor. Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran

arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa negara: sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri (proteksi), dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah Pabean (penyelundupan). Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antar Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara. Terhadap barang-barang ekspor dan impor dilakukan pemeriksaan pabean untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan, terhadap barang ekspor dan impor dilakukan pemeriksaan atas fisik barang dilakukan secara cermat dan terinci dalam arti pemeriksaan barang hanya dilakukan atas importasi yang berisiko tinggi, barang berbahaya bagi masyarakat dan negara serta impor yang dilakukan importir yang mempunyai reputasi atau catatan yang kurang baik.

Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen dalam hal tertentu dapat dilakukan pemeriksaan fisik. Dalam rangka usaha meningkatkan daya saing barang ekspor Indonesia di pasar dunia diperlukan suatu kecepatan dan kepastian bagi eksportir, dengan demikian pemeriksaan pabean dalam bentuk pemeriksaan fisik diusahakan seminimal mungkin, sehingga terdapat barang ekspor pada dasarnya hanya dilakukan penelitian dokumen. Namun dalam keadaan tertentu atas Instruksi Menteri Keuangan dapat menetapkan ketentuan tentang pemeriksaan fisik atas barang ekspor. Pembayaran bea masuk terutang diterapkan sistem menghitung sendiri. Pejabat Bea dan Cukai tidak ada kewenangan untuk hal ini. Penetapan tarif dan nilai pabean diberikan sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean atas impor diserahkan. Sedangkan penetapan nilai pabean untuk bea masuk hanya dapat diberikan setelah pabean diserahkan. Pemberitahuan penyerahan pemberitahuan melalui media elektronik atau sistem electronic Data Interchange (selanjutnya EDI), pembukuan dilakukan untuk pihak eksportir dan importir barang wajib diserahkan pada pabean. Setelah itu dilaksanakan pemeriksaan fisik barang yang dilakukan hanya untuk importir berisiko tinggi melalui sistem random atau acak jalur merah dan hijau.

Sering terjadi hal-hal yang merugikan negara antara lain:

1. Penyelundupan ilegal yang dilakukan di luar pelabuhan tanpa memenuhi formalitas

pelabuhan, misalnya menurunkan barang di tengah laut dengan tujuan menghindari pungutan pabean.

2. Penyelundupan ilegal yang dilakukan melalui pelabuhan dengan atau tanpa bantuan instansi-instansi pelabuhan dengan permainan kualitas dan kuantitas dengan tujuan mengurangi bea masuk dengan cara merendahkan harga barang, mengurangi jumlah barang, mengisi macam-macam barang dalam satu atau dua peti: menggunakan dokumen palsu atau dengan merk yang sama untuk barang yang mahal dan murah.

Untuk menghindari terjadinya penyelundupan maka Bea dan Cukai dalam tempat dan kedudukannya menetapkan wewenang untuk:

1. Memeriksa segala macam kendaraan serta barang yang dimuatnya yang sekiranya mencurigakan.
2. Memerintahkan kapal-kapal yang dicurigai untuk berhenti berlabuh, mengadakan pemeriksaan guna mencegah penyelundupan kecuali kapal perang dan kapal pemerintah.
3. Membongkar kendaraan yang mencurigakan atas biaya bersalah.
4. Memeriksa barang-barang larangan dan pembatasannya.
5. Pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Inspektorat Direktorat Bea dan Cukai berwenang memeriksa bangunan yang dicurigai untuk menyimpan barang-barang yang bertentangan melanggar peraturan-peraturan lapangan.

Tindakan dari Bea Cukai terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di atas adalah:

1. Menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut barang yang ada di atasnya.
2. Memerintahkan agar sarana pengangkut dibawa ke kantor pabean atau ke tempat lain yang sesuai pemeriksaan.
3. Melakukan penyegelan, penguncian dan pelengketan tanda pengaman yang diperlukan terhadap yang ada di atasnya yang belum sesuai kewajiban pabeannya dan barang lainnya yang harus diawali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hal tersebut dilanggar maka terkena Pasal 102 sampai Pasal 105 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (sudah diamandemen).

Instansi-instansi yang terkait dalam pengawasan dan pemeriksaan bea dan cukai terhadap barang-barang adalah :

1. Polisi Airud
2. GAMAT (Penjagaan dan Penyelamatan)

3. Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3)
4. Kantor Kesehatan Pelabuhan
5. Kantor Imigrasi
6. Karantina Hewan dan
7. Karantina Tumbuhan

Keseluruhan pemaparan di atas adalah prosedur yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instansi-instansi dan unit kerja dimaksud antara lain disebutkan:

- a) Administrator Pelabuhan di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- b) Unit Organik Pelabuhan di pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- c) Unit-unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- d) Instansi-instansi Pemerintah lainnya seperti:
 1. Bea dan Cukai
 2. Imigrasi
 3. Pelayanan Kesehatan Pelabuhan
 4. Karantina Hewan

Fungsi Bea dan Cukai diantaranya sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang dalam kaitan pelabuhan sebagai tempat transit.
2. Mengawasi keluar masuknya barang apakah telah dilengkapi dokumen-dokumen resmi dan membawa barang-barang yang ilegal sesuai dengan yang tertera dalam dokumen barang.

Tuntutan globalisasi menuntut pelaksanaan yang cepat, tepat, teratur, efisien dan efektif, karena pelabuhan sebagai tempat transit tidak boleh barang lama menumpuk atau ditimbun, sehingga tuntutan kerja di atas sangat diharapkan dari instansi ini, karena bila tidak akan mengakibatkan kongesti pelabuhan. Untuk mengantisipasi kegiatannya agar cepat, tepat, efektif dan efisien maka Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya menggunakan sistem EDI (Electronic Data Interchange). Sistem komputerisasi ini telah dilakukan sejak tahun 1990, yaitu sistem CFRS atau sistem pengeluaran barang cepat (Customs Fast Release System). Efektif dilaksanakan pada 1 April 1997, sejak berlakunya

UU No. 10 Tahun 1995 maka pengajuan barang impor menjadi kewenangan Bea dan Cukai yang tidak perlu lagi dilakukan pengurusan pra pengapalan di luar negeri. Pelaksanaan komputerisasi sebelum EDI berlaku menggunakan sistim disket. Namun pada kelemahannya karena dinilai belum terlalu efisien dan efektif. Walaupun keunggulannya pihak pengimpor bisa mencetak langsung Formulir pengajuan impor barang (PIB) tanpa mengetik secara manual yang dahulu bisa dilakukan. Pihak Bea dan Cukai hanya mendownload. Pelaksanaan hal di atas 2 (dua) fakta, bahwa secara teori EDI yang pelaksanaannya awal tahun 1999 lebih cepat tapi kenyataannya kalau menyerahkan disket menunggu penetapan selanjutnya adalah kena jalur hijau atau merah. Bila ada kesalahan bisa komunikasi langsung untuk dokumennya dan diperbaiki. Sedangkan EDI, dari kantor Importir ke Bea dan Cukai hanya penyampaian data tapi tidak tahu sudah sampai atau belum data tersebut. Pemakaian EDI banyak keluhan dari pihak pengguna jasa, tapi menurut Bea dan Cukai hal itu merupakan taraf penyesuaian. Untuk menunjukkan sistim percepatan lalu lintas barang di pelabuhan Bea dan Cukai mengeluarkan keputusan No. 81 Tahun 1999 yang terus berjalan sampai dengan berlakunya ketentuan baru yaitu keputusan No.7 Tahun 2003 yang berlaku 1 April 2003 tentang sistim Prosedur Pelaksanaan Kmputerisasi melalui EDI yang harus sudah dilakukan. Pelaksanaan EDI ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai untuk menghindari adanya tatap muka antara pihak pengguna jasa dan pejabat Bea Cukai, untuk menjaga tidak terjadinya suap-menyuap atau KKN. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi Bea dan Cukai dalam pengurusan dokumen adalah:

- a. Tidak disiplinnya pengguna jasa pelabuhan. Kadangkala pengguna jasa tidak mampu memahami sistim dan prosedur yang berlaku. Sebenarnya semua importir baik produsen maupun dapat mengurus sendiri dokumennya tanpa melalui jalur jalur yang tidak resmi yang selama ini terjadi di dalam prakteknya.
- b. Faktor penduduk atau masyarakat setempat yang tidak kuat terhadap peraturan yang berlaku dan sering melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat menghambat kelancaran-kelancaran proses pemeriksaan di lapangan.
- c. Faktor geografis daerah pabean di pelabuhan yang kurang pengawasan dari instansi-instansi pengamanan yang seharusnya lebih cermat dan jeli untuk melihat penyimpangan- penyimpangan seperti penyelundupan-penyelundupan barang yang sering terjadi dan marak akhir-akhir ini.
- d. Tata kerja pegawai pabean yang tidak tahan uji, kurang efektif dalam mengantisipasi penyelundupan-penyelundupan maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di

pelabuhan.

- e. Peraturan yang tegas dan jelas diperlukan untuk menindak pelaku penyelundupan penyelundupan maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pelabuhan.
- f. Upaya-upaya yang dilakukan pihak Bea dan Cukai agar barang-barang tidak tertimbun di pelabuhan adalah melakukan penimbunan barang tidak di lokasi pelabuhan namun di lokasi importir atas barang-barang tertentu misalnya saja sembako, karena lokasi penimbunan di pelabuhan tidak memadai dan dapat menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan. Jadi walaupun belum diperiksa dokumennya, namun barang dapat dikeluarkan, tapi disegel dan akan diperiksa di gudang importir yang mana petugas Bea dan Cukai sudah siaga disana untuk mengawasi pembongkaran barang. Selama barang masih dalam pengawasan Bea dan Cukai tidak dapat diperdagangkan atau diproduksi.

Untuk ekspor barang Bea dan Cukai memberi kemudahan, yang saat ini pelaksanaannya EDI juga dilakukan dengan penyesuaian sebelumnya melalui sistem disket atau manual. Untuk memajukan investasi suatu perusahaan diberi insentif oleh Pemerintah, diberi fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas barang impor dimana tujuan barangnya diekspor. Pihak Bea dan Cukai juga mengatisipasi pegawai-pegawainya agar tidak melakukan kerjasama dengan pihak pengguna jasa untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan, antara lain dengan memberika insentif-instensif dandapajak yang dikenakan pada para pengguna jasa yaitu pengenaan Customs Free yaitu penerimaan negara bukan pajak, yang diharapkan kembali kepada pegawai pajak untuk kesejahteraan dan upaya antisipasi pihak bea dan cukai agar para pegawainya tidak melakukan penyimpangan (bekerjasama untuk penyelundupan). Dari awal sudah diingatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan ; b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan (amandemen); c. bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung

kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

Secara khusus disebutkan dalam pasal 2, bahwa (1) terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar; (2) Bea Keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
- b. meleindungi kelestarian sumber daya alam;
- c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dan komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
- d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri; ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat b (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Masyarakat Indonesia telah dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan dan turunnya moralitas bangsa yang semakin tidak terkendali hingga penyalahgunaan dan peredaran barang-barang gelap atau yang diperoleh secara ilegal merupakan suatu masalah internasional maupun nasional, yang sekarang sedang melanda Indonesia akan menjadi masalah yang semakin kompleks yang dapat merusak dan mengancam kehidupan perekonomian masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat melemahkan ketahanan nasional yang dapat menghambat lajunya pembangunan di segala bidang. Kondisi ini disikapi oleh Bea dan Cukai sebagai bagian obyek yang diantisipasi untuk menanggulangi masalah penyelundupan.

KESIMPULAN

1. Perkembangan tindak pidana penyelundupan di Indonesia masih tergolong memprihatinkan. Dari berbagai kasus yang terungkap dalam 5 (lima) tahun terakhir ini menunjukkan, bahwa mereka (penyelundup) tidak gentar untuk mencoba dan mencoba terus dengan berbagai cara untuk bisa melaksanakan modus operandi kejahatan penyelundupannya. Aspek kepentingan ekonomi, yaitu keinginan mendapatkan keuntungan banyak atau berkali lipat dari hasil penjualan barang-barang yang diselundupkan menjadi salah satu faktor penyebab yang membuat penyelundupan masih dijadikan sebagai cara atau modus operandinya. Mereka juga tidak takut dengan kemungkinan dijerat oleh norma hukum di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masih

beraninya mereka melakukan penyelundupan, meskipun barang-barang yang diselundupkan tergolong mendapatkan ancaman hukuman yang tidak ringan seperti narkoba. Penyelundupan ini juga disebabkan oleh kepentingan pasar di Indonesia yang disebut sangat strategis untuk dijadikan sebagai pasar gelap yang menguntungkan.

2. Eksistensi per Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan di Indonesia sudah digariskan secara yuridis normatif, dalam produk peraturan perundang-undangan baik yang lama maupun yang baru (dari hasil amandemen/pembaruan) telah diatur mengenai peran strategis yang dilakukan oleh Bea dan Cukai untuk menanggulangi problem penyelundupan di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan bahwa produk yuridis ini sebagai jaminan yuridis dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan public, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas yang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

SARAN

1. Sehubungan dengan adanya kasus penyelundupan yang semakin marak di Indonesia, maka diharapkan aparat Bea dan Cukai terus meningkatkan kerjasama atau koordinasinya dengan aparat kepolisian atau dinas terkait yang mempunyai kompetensi berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana penyelundupan.
2. Masyarakat Indonesia seharusnya menyadari bahwa selain tindak pidana penyelundupan merupakan suatu perbuatan yang jelas-jelas melanggar norma hukum, juga mengakibatkan kerugian negara atau bangsa tidak sedikit, sehingga tidak perlu dijadikan sebagai pilihan untuk mendapatkan keuntungan atau mengambil kemanfaatan dari barang-barang hasil kejahatan penyelundupan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Buku

Abdul Ghaffar, (2007) Masa Depan Kejahatan Istimewa di Indonesia, Jakarta : Wacana Indonesia A.S.I, (1992). Ensiklopedia Indonesia I, II, III. Jakarta : PT. Kitiar Baru. Cetakkan ke VI.

Amir MS, 1986, Ekspor Impor Teori dan Penerapannya, Seri Umum No. 3, Jakarta, Penerbit : PPM. Amir MS, 2001, Letter Of Credit : Dalam Bisnis Ekspor Impor, Seri ke-9 Jakarta, Penerbit : PPM.

CST Kansil, 1986. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Balai Pustaka

Herry Gianto, Pengoprasian Pelabuhan, Jakarta : Pelabuhan Indonesia, 1999

I Njoman Nurjaya, Dinamika Hukum, Edisi September 2002, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Joko Prakoso, 1992. Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara. Jakarta : Bina Aksara

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta : Balai Pustaka, 190, Hal : 964

Roni Haritijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Bandung, 1988. Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Media

Soerjono Soekanto, 1989, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Rajawali Pres

Sunardi dan Fanny T., Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan, Fak. Hukum UNISMA, Malang 2001. Majalah Warta Bea dan Cukai, Tahun 1990

Jurnal/Makalah

Irawan Harianto, 2006, Penyelundupan Menguji Kemampuan Aparat Bea dan Cukai, Makalah, Surabaya.